

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah, dimana sasaran yang ingin dicapai dalam pengelolaan hutan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang tinggal disekitar kawasan hutan, maka dari itu pengelolaan hutan harus dilaksanakan secara optimal (Wahanisa, 2015). Pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengatasi gangguan yang mengancam keberadaan hutan, Program di susun oleh pemerintah dalam rangka memperbaiki tata kelola serta pembangunan sektor kehutanan secara nasional (Hamzah, 2014). Paradigma pengelolaan hutan yang menuju ke arah pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan kapasitas masyarakat lokal (masyarakat sekitar hutan) yang tidak hanya sebagai obyek dalam pembangunan kehutanan, namun juga dilibatkan sebagai subyek pembangunan kehutanan (Wulaningdyah, 2006). Dalam implementasi konsep kehutanan masyarakat, pihak Taman Nasional memberi akses kepada masyarakat untuk dapat mengelola lahan hutan dengan mengacu kepada aturan yang berlaku, salah satunya melalui skema kemitraan yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial. Kemitraan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemegang izin pemanfaatan hutan atau pemegang hak pengelolaan dengan masyarakat setempat (Suprpto, 2014)

Kemitraan konservasi merupakan program pemberdayaan yang mengutamakan prinsip-prinsip kesepakatan, kesetaraan, saling menguntungkan, lokal spesifik, kepercayaan, transparansi, dan partisipasi dalam pelaksanaannya. kemitraan konservasi akan membuka lebar peluang berusaha dan informasi pasar, antara lain dengan menekan hambatan birokrasi. Sektor kehutanan harus berupaya untuk memperkuat jejaring usaha dan manajemen di tingkat kelompok tani hutan. Penguatan kelembagaan di tingkat petani di berbagai daerah terbukti mendorong perbaikan produktivitas sumberdaya dan nilai tambah usaha hasil hutan termasuk hasil kayu, non-kayu serta jasa lingkungan (Saipurrozi *et al.*, 2018).

Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Taman nasional

merupakan salah satu jenis kawasan konservasi karena dilindungi, biasanya oleh pemerintah pusat, dari perkembangan manusia dan polusi.

Kemitraan konservasi antara Taman Nasional Gunung Merbabu dan masyarakat desa Wonolelo merupakan salah satu contoh kemitraan yang ada di Taman Nasional. Desa Wonolelo sebagai salah satu unit pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGMb) yang berfungsi sebagai kawasan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya mendapat tekanan dari penduduk di daerah penyangga, yaitu berupa ketergantungan masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup akibat kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relatif terbatas. Kemitraan konservasi antara TNGMb dengan masyarakat di desa wonolelo telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan ketergantungan masyarakat terhadap SDA di TNGMb dengan cara melakukan kemitraan di sector ekowisata (Rusiani, 2018). kemitraan konservasi antara Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan masyarakat desa Argosari juga merupakan contoh kemitraan yang ada di Taman Nasional. kemitraan konservasi pengelolaan air TNBTS khususnya di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang dilakukan oleh Balai Besar TNBTS, PDAM kabupaten, dan Pemerintah Desa Argosari. Kemitraan pengelolaan air TNBTS telah memberikan manfaat berupa jaminan pemanfaatan sumberdaya air, terpeliharanya kelestarian kawasan, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat dan mampu memelihara sumber air dan areal penyangganya.

Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR) memiliki kekayaan sumber daya alam hayati yang tinggi, diantaranya hutan yang masih alami, sumber tata air keanekaragaman flora dan fauna dan lain sebagainya yang berfungsi menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. TNBBBR memiliki tanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengamanan, pemanfaatan dan pengawetan Sumberdaya Alam Hayati (SDAH) Serta pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan penyangga (Auliyani, 2017). Jumlah desa penyangga di sekitar kawasan TNBBBR berjumlah 24 (dua puluh empat) desa. Desa Rantau Malam adalah salah satu desa yang terletak di dekat kawasan TNBBBR. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Nomor SK.80/KSDAE/SET/KSA. 1/2/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Penetapan Lokasi Desa Binaan dan Pendamping pada Daerah Penyangga Kawasan Konservasi, Desa Rantau Malam

ditetapkan sebagai salah satu Desa Binaan TNBBBR. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Balai Taman Nasional selaku pihak pemerintah berkewajiban untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa sekitar kawasan. Upaya untuk mensejahterakan masyarakat telah dilaksanakan pengelola TNBBBR melalui program pemberdayaan masyarakat yaitu kemitraan konservasi di kawasan konservasi. Program tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sekitar kawasan dan kelestarian kawasan. Pendekatan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu wujud pembangunan alternatif yang menghendaki agar masyarakat mampu mandiri dan memiliki keberdayaan. Dalam program pemberdayaan masyarakat daerah penyangga, masyarakat mendapatkan kewenangan untuk mengelola semua kegiatan secara mandiri dan partisipatif. Masyarakat terlibat dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan kegiatan. Selain itu masyarakat mendapat pendampingan dari petugas lapangan, dukungan dari pengelola TNBBBR serta terdapat kelembagaan berupa Kelompok kemitraan. Program pemberdayaan masyarakat desa sekitar kawasan Taman Nasional berupa kegiatan peningkatan usaha ekonomi produktif. Jenis kegiatan usaha itu adalah Ekowisata Pendakian Bukit Raya. Keberhasilan tujuan program pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh besar kecilnya partisipasi masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan oleh masyarakat, namun demikian terkait dengan strategi pemberdayaan masyarakat daerah penyangga melalui pengembangan ekowisata di Desa Rantau Malam belum diketahui. Kajian atau penelitian mengenai bentuk kemitraan di Desa Rantau Malam juga belum diketahui, sehingga diperlukan adanya penelitian mengenai kegiatan kemitraan konservasi dan bentuk kemitraan dalam pengelolaan serta pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di desa Rantau Malam di TNBBBR.

Pemberdayaan masyarakat di desa penyangga kawasan hutan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan

masyarakat merupakan salah satu wujud implementasi rencana pengelolaan Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR) terhadap desa penyangga di sekitar kawasan TNBBBR.

RUMUSAN MASALAH

Program pemberdayaan masyarakat lewat Kemitraan Konservasi telah dilaksanakan oleh masyarakat desa Rantau Malam yang berupaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan program kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Kemitraan saat ini adalah pengembangan ekowisata belum sepenuhnya memenuhi prioritas kebutuhan masyarakat. Apa saja bentuk kemitraan konservasi yang ada di desa Rantau Malam TNBBBR, dan apa yang menjadi pendorong serta penghambat dalam proses implementasi program Kemitraan Konservasi di Desa Rantau Malam.

TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menjelaskan bentuk kemitraan dalam pengelolaan TNBBBR
2. Menguraikan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses implementasi kemitraan konservasi antara TNBBBR dengan masyarakat di Desa Rantau Malam.

Manfaat dari hasil penelitian ini di harapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan mengenai kemitraan konservasi dan proses pemberdayaan masyarakat dalam program kemitraan konservasi untuk lebih mendorong keadaan hutan yang lestari serta mengetahui kendala-kendala yang dialami kelompok kemitraan konservasi Sehingga kendala tersebut bisa dihindari pada kemitraan konservasi di wilayah lainnya.